

Moderasi Beragama Sebagai Tameng Politik Identitas Dalam PEMILU 2024

Alexander Stevanus

Sekolah Tinggi Agama Kristen Lentera Bangsa Manado
alexanderstevanus@staklb-manado.ac.id

— — — — —
Diterima tanggal: 13/10/2024

Dipublikasikan tanggal: 31/10/2024
— — — — —

Abstract:

In the election the people are given the freedom to choose the leader of the country. and people's representatives or legislative members. In an effort to carry out an honest and fair election, of course there are many challenges, especially among presidential candidate pairs and legislative candidates as well as the winning team or campaign. Various efforts include implementing religious identity politics to achieve victory and gain a seat of power. In an effort to ward off attempts at identity politics, implementing religious moderation can be a shield against attempts at identity politics. The aim of this research is to analyze the extent to which the role of religious moderation can act as a shield against efforts to politicize identity in the midst of the 2024 elections. The research method used is qualitative research by describing an analysis of the importance of religious moderation in preventing identity politics. The results of this research are that religious moderation is a shield against efforts to political identity in the midst of the 2024 elections.

Keywords: Religious moderation, identity politics, 2024 election

Abstrak:

Pada Pemilu rakyat diberi kebebasan untuk memilih pemimpin negara dan perwakilan rakyat. Dalam upaya melaksanakan pemilu yang jujur dan adil tentu banyak tantangan terutama dari kalangan pasangan calon presiden maupun calon anggota legislatif maupun tim pemenang atau kampanye. Berbagai usaha termasuk di dalamnya menerapkan politik identitas yang berbaur agama untuk mencapai kemenangan dan meraih kursi kekuasaan. Dalam upaya menangkal upaya politik identitas, penerapan moderasi agama dapat menjadi perisai terhadap upaya politik identitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana peran moderasi beragama dapat menjadi perisai terhadap upaya politisasi identitas di tengah Pemilu 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan analisis pentingnya moderasi beragama dalam menangkal politik identitas. Hasil penelitian ini adalah bahwa moderasi agama adalah perisai terhadap upaya pilitik identitas di tengah Pemilu 2024.

Kata kunci: Moderasi beragama, politik identitas, pemilu 2024

Pendahuluan

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan merdeka karena perjuangan seluruh pemimpin dan rakyat, sangatlah menjunjung tinggi demokrasi. Demokrasi merupakan suatu system pemerintahan yang dipusatkan pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Istilah demokrasi itu sendiri berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu kata “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti pemerintahan atau kekuasaan.¹ Sehingga secara konseptual, demokrasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan dimana rakyat memegang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi, atau yang Abraham Lincoln (1867), mantan presiden Amerika Serikat katakan sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*). Tetapi, pada dasarnya kedaulatan dan kekuasaan oleh rakyat tidak diartikan sebagai rakyat yang memerintah secara praksis di masyarakat, tetapi rakyat memberikan kedaulatan kekuasaan kepada pemerintah eksekutif untuk memerintah dan melaksanakan mandat praksis kepemimpinan dan kepada legislatif mandat untuk menyampaikan amanah dari rakyat.

Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia merupakan Negara yang kaya dan plural baik secara budaya, agama dan realitas sosial. Oleh karena itu, dalam Negara demokrasi Indonesia, Pemilihan Umum atau yang dikenal dengan pemilu adalah suatu pesta demokrasi besar dimana rakyat memberikan amanah kepada pemimpin Negara dan wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan dan menjalankan suara rakyat demi terciptanya pemerintahan yang adil dan jujur yang berdampak pada terciptanya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pemilu yang dilaksanakan dengan semboyan “LUBER” atau langsung, umum, bebas, rahasia membuat rakyat memiliki kuasa dan kedaulatan dalam memilih dan menentukan pemimpin yang mereka kehendaki untuk menyuarkan aspirasi mereka demi terciptanya kesejahteraan hidup mereka. Amanat suara rakyat itu sendiri dalam system politik di Indonesia disampaikan melalui partai politik yang lulus seleksi untuk mengikuti Pemilu. Tak pelak lagi bahwa dengan system Pemilu seperti ini betapa pentingnya suara rakyat melalui jalur politik yang dapat disampaikan untuk menentukan pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang menjadi penyeimbang bagi pemerintahan.

¹ Ria Casmi Arrsa, Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi, Jurnal Konstitusi Vol. 11, No. 3 September 2014., hlm. 515-537.

Di dalam Negara demokrasi, khususnya di Indonesia, Pemilu merupakan aspek utama dan sangat penting untuk terus diselenggarakan.² Melalui proses pemilu ini, rakyat sebagai warga dapat berpartisipasi secara langsung melakukan proses kedaulatan guna terpilihnya pemimpin Negara dan wakil rakyat yang dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat itu sendiri. Sejak tahun 2004 Pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan model yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dimana sejak saat itu rakyat benar-benar diberi kebebasan secara langsung untuk dapat memilih baik itu presiden (yang sebelum tahun 2004 ditentukan oleh pemilihan oleh MPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, system Pemilu yang dilakukan secara langsung seperti ini juga memiliki sisi negatif yang sering menimbulkan konflik. Saat suara rakyat terwakilkan oleh partai politik, maka kemurnian suara rakyat tersebut akan terkontaminasi oleh kepentingan politik sehingga seringkali partai politik untuk mendapatkan kekuasaan selalu memberi stigma kepentingan mereka sebagai kepentingan rakyat.

Suara rakyat yang berbalut partai politik dalam setiap kepentingan mereka akan selalu juga menimbulkan konflik kekuasaan yang pada dasarnya rakyatlah yang dirugikan. Pemilu dengan system seperti ini secara tidak langsung akan membangun kontestasi politik dimana masing-masing calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif (caleg) akan bersaing untuk merebut kursi kekuasaan sebagai pemimpin pemerintahan maupun sebagai "wakil rakyat". Dalam kontestasi politik sudah merupakan hal yang normatif untuk bersaing dengan melakukan segala cara bahkan melegalkan segala cara mulai dari "sogok" uang misalnya, sekalipun hal tersebut dilarang bahkan memiliki sanksi hukum, sampai pelegalan politik identitas yang ujungnya dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa bahkan sampai pada polarisasi dan konflik sosial.³ Politik identitas dengan membawa suku, etnis, bahkan agama di tengah bangsa Indonesia selalu menjadi ancaman serius sejak Pemilu 2014 bahkan sejak Pilkada DKI 2017.

Politik identitas yang seharusnya berbau positif dalam bentuk kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular (khas) dalam bentuk relasi identitas primordial, khususnya etnik dan agama, dalam

² Rosita Tryas Fitriana dan Winarno Widyatmojo, Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol 1, No. 2 Tahun 2022., hlm. 214-220.

³ Agus Sutisna, Analisis Faktor-faktor Non-Elektoral Potensi Pemicu Konflik Pemilu 2024. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 5, No. 1 November 2023., hlm. 94-112.

praktiknya kemudian, gagasan politik identitas mengalami transformasi menjadi instrumen politik untuk meraih kekuasaan dan/atau mempertahankan status quo oleh para aktor politik.⁴ Namun, pada akhirnya politik identitas menjadi senjata politik yang dikapitalisasi oleh kekuasaan para penguasa untuk mempertahankan *status quo* dan memenangi kontestasi politik tanpa mempertimbangkan munculnya konflik arus bawah dan keadaan sosio politik dan *religious* di masyarakat. Oleh karena itu penggalakan moderasi beragama dari berbagai pihak baik itu pemerintah maupun tokoh-tokoh keagamaan merupakan upaya dalam meredam gejolak politik yang dibangun oleh elit politik dengan menggunakan politik identitas sebagai senjata meraih kekuasaan dengan dalih kehendak rakyat, sekalipun faktanya rakyat menjadi korban atas konflik karena politik identitas yang menyebabkan diskriminasi etnis, agama dan bahkan polarisasi.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan atau metode penelitian kualitatif. Melalui metode atau pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dikarenakan dalam penelitian kualitatif peneliti dilibatkan secara langsung dalam proses penelitian, bahkan dapat mengalami secara langsung fenomena-fenomena atau konteks situasi yang sedang diteliti.⁵ Setiap fenomena dan kejadian dalam penelitian kualitatif merupakan sesuatu yang unik dikarenakan perbedaan konteks, sehingga perlu dideskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai konteks dan fenomena yang terjadi. Hasil dari deskripsi tersebut akan tergambar potret kondisi dalam konteks yang alami (*natural setting*) tentang apa adanya yang terjadi menurut fakta yang terjadi di lapangan.⁶ Oleh karena itu, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menguraikan fakta-fakta di lapangan secara natural karena peneliti secara langsung melakukan observasi dan bahkan mengalami secara langsung kejadian-kejadian yang diteliti, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Yusanto, penelitian kualitatif memiliki ragam dan berbagai pendekatannya tersendiri sehingga para peneliti kualitatif dapat memilih dari berbagai ragam tersebut untuk menyesuaikan dengan objek yang

⁴ Ibid.

⁵ Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol. 21, No. 1, Tahun 2021., hlm. 33-54.

⁶ Ibid.

ditelitinya.⁷ Dalam penelitian kualitatif analisis data harus dilakukan dengan teliti agar data-data yang sudah diperoleh mampu dinarasikan atau diceritakan kembali dengan baik sehingga dapat menjadi hasil penelitian yang layak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka (*library research*) yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literature yang berhubungan dengan topic penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini penelitian melakukan kerja penelitian dengan cara mengumpulkan data dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan moderasi beragama dan bagaimana moderasi beragama dalam menangkal upaya penerapan politik identitas di tengah Pemilu 2024. Dalam penelitian kualitatif ini selalu didasarkan pada filsafat post-positivisme yang sangat berguna bagi penelitian objek ilmiah, dan tujuan utama penelitian kualitatif ini adalah membuat fakta/ fenomena agar dapat dengan mudah dipahami (*understandable*) dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru.⁸

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian hasil dan pembahasan ini, akan dikaji dan analisis mengenai politik identitas sebagai penyebab disintegrasi bangsa dan bagaimana moderasi beragama sebagai tameng menangkal upaya politik identitas tersebut, khususnya di tengah Pemilu 2024.

Politik Identitas dan Disintegrasi Bangsa

Indonesia merupakan Negara yang terletak di jalur “sutra” yaitu di lintasan khatulistiwa dimana Negara Indonesia ini merupakan Negara dan bangsa yang sangat multidimensional, multi cultural dan multireligius. Sebagai Negara yang telah merdeka Indonesia tentu memiliki identitas dalam kebangsaan yang membuatnya dapat dikenal dan menjadi pembeda dengan Negara lain dan bahkan menandakan kewibawaan bangsa.⁹ Identitas Negara Indonesia sangatlah kompleks baik dalam hal etnis, ras, agama maupun kekayaan antar-golongan dikarenakan Negara Indonesia merupakan Negara yang terbentuk dari kesatuan pulau-pulau yang dihuni oleh berbagai suku

⁷ Y. Yusanto, Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication* Vol. 1, No. 1 Tahun 2019., hlm 1-13.

⁸ Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistik*, (Surabaya: Penerbit Airlangga University Press, 2017).

⁹ Widyawati, *Menguatnya Politik Identitas di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial dan Etnis*. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 2, No. 2 Oktober 2021., hlm. 66-87.

bangsa, keagamaan dan ciri khas atau keunikan masing-masing kelompok etnis dan budaya. Identitas bangsa merupakan suatu kekayaan dan keunikan tersendiri yang membuat bangsa ini memiliki ciri khas dan bahkan nilai-nilai positif yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mengembangkan dan memperkaya warisan budaya dan realitas sosial di masyarakat. Hanya saja, selain memiliki nilai positif, identitas dapat memiliki nilai negatif jika digunakan sebagai alat untuk kepentingan orang maupun kelompok dalam mencapai tujuannya terlebih lagi mencapai kekuasaan.

Pembentukan identitas itu sendiri adap berupa pembentukan identitas secara parsial maupun interaksial yang dapat melahirkan dan mempengaruhi sosial, baik sosial-ekonomi, sosial-politik dan sosial-budaya.¹⁰ Identitas merupakan elemen yang sangat penting, terutama identitas agama dan etnis merupakan elemen dan unsur yang sangat sensitif dan dapat merubah konstruksi dan gejala sosial. Politik identitas yang dilaksanakan secara nyata ataupun tidak nyata, langsung ataupun tidak langsung akan menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Politik identitas dampaknya secara positif dapat menjadi suatu kekayaan yang memperkuat kautuhan bangsa Indonesia yang terbentuk oleh keanekaragaman suku bangsa, tetapi juga politik identitas dapat mengarah pada hal negatif yaitu terbentuknya polarisasi dan keterpecahbelahan bangsa karena kepentingan segelintir orang. Tiga elemen besar dalam politik identitas yang dapat menjadi alat polarisasi adalah agama, suku dan kekuatan antar-golongan (etnis kekuasaan ekonomi). Proses demokrasi yang berlangsung di Negara Indonesia pada dasarnya tidak terlepas pemberlakuan politik identitas sebagai senjata akhir dan senjata pamungkas untuk memenangkan kontestasi politik. Sekalipun dampaknya adalah keterpecahan sosial, tetapi kepentingan pribadi dan golongan atau kelompok tertentu menjadi tujuan utama.

Politik identitas selama ini menjadi alat dalam perpolitikan para elit penguasa untuk mendapatkan kursi kekuasaan dengan memanfaatkan keunikan dan keberagaman baik itu suku-etnis, agama dan kelompok atau golongan tertentu. Secara konseptual, politik identitas adalah politik yang mengedepankan kepentingan kelompok tertentu karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik tertentu yang dalam pengertian yang sederhana, politik identitas adalah politik perbedaan.¹¹ Sementara itu, Cressida Heyes mendefinisikan politik identitas sebagai suatu penandaan aktivitas politis yang dalam pengertian yang lebih luas politik identitas berkepentingan

¹⁰ Juhana Nasruddin, *Politik Identitas dan Representasi Politik: Studi kasus Pada Pilkada DKI 2018-2022*, Hanifiya: Jurnal Studi Agama-agama Vol. 1, No. 1 Tahun 2018., hlm. 34-47.

¹¹ Ibid.

dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas.¹² Jika dicermati Politik identitas sebenarnya merupakan nama lain dari biopolitik yang berbicara tentang satu kelompok yang diidentikkan oleh karakteristik biologis atau tujuan-tujuan biologisnya dari suatu titik pandang. Sebagai contoh adalah politik ras dan politik gender.¹³ Dalam sejarahnya, politik identitas muncul pada tahun 1970-an di Amerika Serikat dengan tuntutan perjuangan para kaum minoritas, gender, ras yang selalu ditempatkan pada posisi yang terpinggirkan.¹⁴ Dalam sejarah kehidupan manusia selalu digerakan dan didorong oleh perjuangan untuk pengakuan.

Praktik politik identitas selalu muncul pada tahun politik, di era pemilihan kepala daerah (PILKADA), pemilihan presiden (Pilpres) atau pemilihan umum (PEMILU). Pada Pemilu 2024 ini misalnya menjadi suatu pesta demokrasi besar bagi rakyat Indonesia karena pada Pemilu 2024 kali ini merupakan Pemilu serentak dimana pada Pemilu kali ini rakyat akan memilih secara langsung dan serentak baik presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin eksekutif maupun DPR RI, DPD RI, DPRD dan DPD Provinsi sebagai pemimpin legislatif yang disebut sebagai wakil rakyat. Pemilu serentak ini dilaksanakan dengan alasan pertimbangan efisiensi pembiayaan, sekalipun pada praktiknya terdapat peningkatan pembiayaan baik pada Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024.¹⁵ Dalam pesta demokrasi serentak di tahun 2024 akan diikuti oleh 18 partai peserta Pemilu dan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan nomor urut 1 Anie Baswedan-Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan pasangan nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dalam kontestasi besar di pesta demokrasi tahun 2024 kali ini rakyat perlu untuk dengan bijak memilih pemimpin bangsa ke depan untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih baik.

Perlu menjadi perhatian juga bahwa dalam Pemilu serentak tahun 2024 ini adalah kewaspadaan terhadap praktik politik identitas baik oleh pribadi, partai atau golongan tertentu untuk memenangkan kontestasi ini. Praktik politik identitas ini pernah terjadi pada Pilkada DKI 2017 dimana

¹² Heyes Cressida, *Identity Politic*. Amerika Serikat (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007).

¹³ Ibid.

¹⁴ I Putu Sastra Wingarta, Berlian Hermi, Dwi Hartono, I Waya Mertadana, Reda Wicaksono, Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* Vol. 9, No. 4., hlm. 117-124.

¹⁵ Dwi Astrianti Defretes, Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Jurnal Hasil Penelitian* Vol. 8, No. 2 Juli 2023., hlm. 49-58.

munculnya representasi politik karena fenomena dan gejala politik yang mempengaruhi pelaksanaan system demokrasi.¹⁶ Politik identitas dalam bentuk agama menjadi “*momok*” yang menakutkan untuk kembali terulang karena dampaknya yang begitu besar dapat memecah-belah kesatuan bangsa. Penggunaan politik identitas itu juga yang perlu diwaspadai dalam kontestasi Pemilu 2024 kali ini. pertarungan dalam percaturan politik tahun 2024 ini, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden akan menjadi pertarungan yang “sengit” dalam merebut tahta kepemimpinan bangsa di Indonesia. Persoalan-persoalan sudah mulai timbul sejak penetapan sah dari Mahkamah Konstitusi mengenai Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kontroversi penetapan sah Gibran menimbulkan pro dan kontra yang berkesinambungan yang menyebabkan persaingan merebut kursi orang nomor satu di Indonesia ini.

Potensi politik identitas juga berpotensi muncul dengan masuknya pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Juhana nasruddin yang didukung oleh tulisan Muhammad Nurul Firdaus dan Lusi Andriyani dalam tulisan mereka mengemukakan fakta dan pengalaman penggunaan politik identitas oleh Anies Baswedan dalam Pilkada DKI tahun 2017 (Studi Kasus Pilkada 2018-2022).¹⁷ Pengalaman PILKADA DKI tersebut dapat saja terulang kembali jika pasangan capres dan cawapres misalnya Anies Baswedan menggunakan kembali politik identitas agama sebagai alat memenangkan kontestasi politik dalam pemilihan capres dan cawapres pada Pemilu tahun 2024 ini. Politik identitas khususnya agama berpeluang terjadi dengan memanfaatkan kaum Islam radikal yang sekalipun secara organisasi (FPI, Jamaah Islamiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, dll) sudah dibubarkan oleh pemerintah RI tetapi secara praksis gerakan mereka masih berlangsung misalnya melalui gerakan 212 maupun pengajaran Islam radikal yang dilaksanakan di kampus atau pesantren. Penggunaan politik identitas agama khususnya dengan memanfaatkan mayoritas agama Islam dengan gerakan radikal Islam di Indonesia sangat berpotensi meretakan kesatuan rakyat yang selama ini terbina karena perbedaan.

Politik identitas yang terbentuk karena adanya kesamaan identitas dan bahkan karena kepentingan seringkali menjadi penyebab konflik politik antara pihak yang superior dengan yang inferior, antara yang mayoritas dengan para minoritas. Indonesia sebagai Negara yang didasarkan kepada

¹⁶ Juhana Nasruddin, *Politik Identitas dan Representasi Politik.*, op.cit.

¹⁷ Ibid. bnd. Muhammad Nurul Firdaus, Lusi Andriyani, *Politik Identitas Agama dan Etnis di Indonesia*. INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Vol. 2, No. 2 Tahun 2021., hlm. 46-50.

Pancasila, dimana keberagaman dibangun atas satu kesatuan atau keesaan yang termasuk di dalamnya adalah agama juga dapat terpolarisasi karena politik identitas, bahkan agama dalam kesatuan yang esa dapat menjadi sumber perpecahan dalam kesatuan bangsa dan negara.¹⁸ Pemilu atau Pilkada seperti menjadi tempat yang subur bagi para calon pemimpin bangsa dan Negara ini untuk membangun politik identitas yang bukan karena kepentingan rakyat, tetapi karena kepentingan kekuasaan, terutama kepentingan kekuasaan partai politik sang pengusung pemimpin pemerintahan maupun calon legislator. Mewaspadaai politik identitas di tengah Pemilu serentak 2024 adalah tugas untuk membendung polarisasi rakyat dengan isu-isu agama, ras maupun golongan-golongan tertentu. Tak dapat dipungkiri sebenarnya bahwa yang dirugikan atas pemberlakuan politik identitas ini bukanlah penguasa, calon pemimpin, legislator atau pimpinan partai politik, tetapi rakyat adalah pihak yang paling dirugikan atas praktek ini.

Selama ini, hasil dari politik identitas menyebabkan elit partai politik maupun para calon penguasa hanya duduk di kursi nyaman dan menjadi inisiator atas konsep politik identitas karena ketidakpuasan mereka atau sengketa hasil Pemilu, tetapi yang kontras adalah bahwa rakyat yang harus menjadi tameng untuk melakukan konfrontasi dengan pihak lain atau bahkan rakyat sendiri atau dapat dikatakan bahwa rakyat bertikai dengan sesama rakyat bagi kepentingan penguasa yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Artinya di sini rakyat menjadi korban dan membangun konflik dengan sesamanya sebagai kaum proletar yang direpresentasikan sebagai rakyat dan kapitalisme politik yang direpresentasikan sebagai penguasa politik menjadi tuan yang menikmati hasil konflik politis. Memang sangat ironis hasil dari konflik yang disebabkan oleh politik identitas. Ironis memang bahwa pada saat kontestasi politik terutama dalam Pemilu maupun Pilkada, partai politik dan calon yang diusungnya mengelola politik identitas sebagai hal yang normal untuk mencapai kekuasaan, padahal dampak yang dihasilkan tidak sesuai dengan nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa. Politik identitas muncul sebagai suatu aturan main yang normatif tanpa *legal standing* tetapi sah dalam mencapai tujuannya, tetapi tanpa mempertimbangkan akan terciptanya disintegrasi bangsa. Dalam politik identitas, agama terutama, diproduksi sebagai senjata tajam untuk membelah kesatuan masyarakat dengan mengatasnamakan “Tuhan” dan kepentingan rakyat. Agama yang harusnya menjadi pemersatu dengan ideologi dan filosofi kebaikan berubah

¹⁸ Yeni Sri Lestari, Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama. Jurnal of Politics And Policy Vol. 1, Tahun 2018.

dan terdekonstruksi oleh kepentingan politik dan berubah menjadi sumber penyebab disintegrasi bangsa.

Moderasi Beragama dan Upaya Meredam Politik Identitas

Politik identitas terutama dalam Pemilu dengan memanfaatkan keanekaragaman bangsa baik budaya, agama dan realitas sosial antar-golongan sangat rawan menimbulkan disintegrasi dan konflik. Oleh karena itu secara konseptual dan praktik perlu suatu upaya dalam meredam praktik politik identitas. Dalam upaya menjaga keragaman tradisi-budaya, agama dan perbedaan komunitas atau golongan, pemerintah maupun institusi pendidikan agama terus menggalakan moderasi beragama. Politik identitas terutama dalam Pemilu yang menimbulkan konflik sering terjadi secara sporadis dan anarkis. Oleh karena itu sangat penting untuk membangun pemikiran konseptual dan praksis moderasi beragama di tengah euphoria Pemilu yang menghindarkan rakyat dari konflik disintegrasi yang disebabkan oleh politik identitas. Menurut buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, moderasi beragama, kata moderasi berasal dari bahasa Latin "*moderatio*" yang berarti "ke-sedang-an" (tidak lebih dan tidak kurang), atau sikap penguasaan diri dari kelebihan dan kekurangan, sehingga kata moderat dapat diartikan adalah sikap yang adil, seimbang dan tidak bersikap ekstrim.¹⁹ Sementara itu menurut Muhammad Abror, kata moderasi berasal dari kata moderat atau *moderation* dalam bahasa Inggris yang memiliki arti tidak berlebih-lebihan, sedang atau pertengahan.²⁰ Moderasi beragama sendiri adalah suatu sikap dimana seseorang pemeluk beragama tertentu bersikap biasa saja, adil dan tidak ekstrem dalam menganut atau membela agamanya. Sebagai seorang umat beragama, perlu untuk memahami moderasi beragama dengan seimbang antara pengalaman pribadi dan praktik agama yang dilakukan dengan setia dan sikap dalam menghormati dan menghargai oleh orang lain yang beragama lain.²¹

Moderasi beragama ini dilakukan agar pemeluk agama tidak hidup dalam keadaan fanatik atau sikap fanatik dalam beragama. Dalam menangkalkan politik identitas terutama di tengah Pemilu 2024, moderasi beragama yang dicanangkan harus dibangun dalam koridor dan dasar ideologi negara

¹⁹ Kementerian Agama RI, Moderasi beragama, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)., hlm. 43.

²⁰ Muhammad Abror, Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi, Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam Vol. 1, No. 2, Desember 2020., hlm. 143-155.

²¹ Zahdi dan Iqrima, Implementasi Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Al-Quran di Mushola Nur Ahmad, Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama Vol. 1, No. 1 Tahun 2021., hlm. 142-161.

Indonesia yaitu Pancasila yang menekankan terciptanya kerukunan antarumat beragama. Bangsa Indonesia selama ini menjadi contoh dalam mengelola keberagaman agama dan budaya, dan bahkan dianggap cukup berhasil dalam hal membangun harmonisasi mengenai bagaimana cara membangun kehidupan beragama sekaligus kehidupan bernegara.²² Harmonisasi dalam dua kutub yang berbeda antara beragama dan bernegara ini yang harus dipertahankan, ditanamkan menjadi pondasi dalam membangun keberagaman di Indonesia, sehingga pondasi dalam moderasi beragama ini dapat menjadi tameng dalam menghadapi ancaman penggunaan politik identitas di tengah Pemilu 2024. Moderasi beragama yang dibangun dalam azas toleransi beragama bukanlah upaya untuk melebur setiap agama dalam satu konsep keagamaan dan ketuhanan dan bukan pula suatu upaya bertukar dan saling mempelajari agama. Moderasi dalam bingkai toleransi adalah upaya untuk saling menghormati keunikan dan keanekaragaman dalam spiritualitas setiap agama yang berbeda.

Di tengah Pemilu 2024 sebagai suatu pesta besar bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia, penerapan moderasi beragama sangatlah penting bahkan menjadi tiang kokoh yang mempererat kesatuan bangsa di tengah perbedaan pilihan. Dengan membentengi dan memberikan pengajaran moderasi beragama secara konsisten dan dengan konstruksi Pancasila sebagai ideologi bangsa, rakyat akan memiliki kedewasaan berpikir dan tidak mudah terprovokasi oleh upaya-upaya pelaksanaan politik identitas. Peran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama melalui organisasi-organisasi keagamaan, ormas, dan institusi pendidikan keagamaan baik di sekolah maupun perguruan tinggi mengenai moderasi beragama merupakan suatu upaya membangun pondasi ideologi dan pemahaman yang benar mengenai agama. Agama oleh banyak kalangan radikal hanya dipandang secara tekstual tanpa memperhatikan konteks membuat umat beragama berpikir sempit dan fundamental yang berujung pada radikal-negatif. Pemikiran dan ideologi seperti ini yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh elit politik sebagai sarana merebut kekuasaan.

Pada dasarnya radikalisme agama memiliki cita-cita yang berbeda dengan para politisi dan elit politik yang menginginkan kekuasaan. Para radikalisme agama selalu menginginkan adanya kesatuan negara-agama. Mereka menafsirkan teks-teks kitab suci secara literer dan menginginkan perubahan konstruksi dan ideologi negara menjadi konstruksi dan ideologi agama. Hal itu sebenarnya sangat berbeda dengan cita-cita elit politik yang

²² Kementerian Agama RI., *op.cit.*

menginginkan kekuasaan dengan apapun caranya. Sekalipun memiliki konsep yang berbeda, upaya saling memanfaatkan kepentingan dapat terjadi dengan membangun politik identitas berdasarkan kesamaan agama, suku, ataupun budaya dan kepentingan antar-golongan. Sehingga, lewat kesamaan identitas ini masing-masing bekerja sama untuk menggapai kepentingan mereka. Tak ayal lagi tentu rakyat menjadi korban atas konflik kepentingan politik para elit politik dan elit agamis-radikalis akan memerintahkan dan menghegemoni pengikutnya untuk merekonstruksi konflik kepentingan yang mengatasnamakan rakyat dan berkonfrontasi dengan pemerintah atau kubu yang memenangi electoral. Hal ini tak dapat dipungkiri akan mengakibatkan konflik dan pertikaian di ranah bawah (rakyat), sedangkan para elit politik dan elit agama akan menunggu hasil dan merancang perebutan kekuasaan.

Rekonstruksi moderasi beragama sudah bukan lagi dibangun pada ranah atas saja, apalagi hanya menjadi dasar konseptual tanpa praksis yang berimplikasi secara nyata. Selama ini banya program moderasi beragama diterapkan untuk pemimpin agama tanpa realisasi di ranah bawah (umat/rakyat). Para pemimpin keagamaan, pemerintah, maupun penyuluh keagamaan hanya memenuhi tugas dalam bingkai regulasi dan tugas kerja dan bukannya membangun kesadaran bahwa moderasi beragama sangatlah penting secara konseptual dan praksis nyata di lapangan. Jika moderasi beragama dilaksanakan hanya karena regulasi ataupun tugas kerja wajib pemerintah, penyuluh atau tokoh agama, maka yang terjadi hanyalah teori tanpa implikasi dan perubahan. Oleh karena itu, secara konseptual dan praksis, moderasi beragama harus dipaparkan kepada ranah bawah. Pemerintah, penyuluh keagamaan, tokoh agama dan para akademisi perlu memiliki pemikiran kritis yang religius dan agamis untuk turut memikirkan peran mereka dalam kontestasi politik di Pemilu serentak 2024 ini. upaya paling relevan adalah dengan membekali umat dan rakyat untuk berpikir sehat dan membentenginya dengan pemikiran moderasi beragama dan praksisnya di tengah perbedaan pilihan. Upaya yang relevan ini akan menjadi tameng untuk menangkal upaya-upaya politik identitas yang dapat saja terjadi di tengah kontestasi politik.

Kesimpulan

Berdasarkan pokok bahasan dan kajian, serta analisis yang telah diuraikan di atas, makadapat ditemukan bahwa politik identitas dalam pengalaman pelaksanaan Pemilu atau Pilkada dapat saja terjadi. Dengan pengalaman tersebut, maka perlu upaya penangkalan terhadap politik

identitas terutama di masa kontestasi politik Pemilu 2024. Politik identitas adalah upaya yang sangat berbahaya yang banyak dilakukan oleh elit politik ataupun kandidat (calon pemimpin daerah maupun pusat) untuk menggunakan identitas ras, suku, budaya, bahkan agama sebagai senjata merebut kekuasaan. Hanya saja, dalam politik identitas rakyat atau kaum minoritas yang tersubordinasi akan menjadi korban. Selain itu, upaya politik identitas juga dapat membangun diskriminasi, polarisasi dan disintegrasi bangsa yang selama ini rukun dalam keberagaman. Moderasi beragama harus dibangun dalam bingkai toleransi, dimana agama bukan jadi alat pemecah-belah, tetapi alat pemersatu dalam keanekaragaman suku-adat, budaya, agama bahkan kepentingan antar-golongan.

Upaya dalam menangkal politik identitas dapat dilakukan dengan rekonstruksi moderasi beragama yang bukan hanya dibangun secara konseptual, tetapi juga dalam praksis yang nantinya dapat berimplikasi dalam realitas sosial, sehingga menciptakan stabilitas sosial dan bukannya perubahan sosial karena konflik kepentingan dan kekuasaan. Peran tokoh beragama, pemerintah, penyuluh keagamaan dan para akademisi sangat penting untuk menanamkan konsep moderasi beragama dalam bingkai ideologi Pancasila. Jika penanaman moderasi beragama dapat tersalur secara merata, dimana para elit pemerintahan dan agama memiliki pemikiran membangun bangsa dengan baik melalui kontestasi Pemilu 2024 maka penting untuk mengantisipasi munculnya politik identitas dan berupaya turut membangun Pemilu 2024 yang jujur dan adil. Moderasi beragama harus menjadi tameng atau perisai terhadap politik identitas.

Referensi

- Agus Sutisna. "Analisis Faktor-faktor Non-Elektoral Potensi Pemicu Konflik Pemilu 2024". *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 5, No. 1 (2023): 94-112.
- Dwi Astrianti Defretes. "Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024". *Jurnal Hasil Penelitian* 8, No. 2 (2023): 49-58.
- Heyes Cressida. (2007). *Identity Politic*. Amerika Serikat: Stanford Encyclopedia of Philosophy.
- I Putu Sastra Wingarta, Berlian Hermi, Dwi Hartono, I Waya Mertadana, Reda Wicaksono. "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 9, No. 4: 117-124.

- Juhana Nasruddin. "Politik Identitas dan Representasi Politik: Studi kasus Pada Pilkada DKI 2018-2022". *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-agama* 1, No. 1 (2018): 34-47.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Muhammad Abror. "Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi". *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam* 1, No. 2, (2020): 143-155.
- Muhammad Nurul Firdaus, Lusi Andruyani. "Politik Identitas Agama dan Etnis di Indonesia". *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 2, No. 2 (2021): 46-50.
- Muhammad Rijal Fadli. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif". *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, No. 1 (2021): 33-54.
- Ria Casmi Arrsa. "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi". *Jurnal Konstitusi* 11, No. 3 (2014): 515-537.
- Rosita Tryas Fitriana dan Winarno Widyatmojo. "Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024". *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, No. 2 (2022): 214-220.
- Sarmanu. (2017). "Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistik". Surabaya: Penerbit Airlangga University Press.
- Widyawati. "Menguatnya Politik Identitas di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial dan Etnis". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, No. 2 (2021): 66-87.
- Y. Yusanto. "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif". *Journal of Scientific Communication* 1, No. 1 (2019): 1-13.
- Yeni Sri Lestari. "Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama". *Jurnal of Politics And Policy* 1, (2018).
- Zahdi dan Iqrima. "Implementasi Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Al-Quran di Mushola Nur Ahmad". *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 1, No. 1 (2021): 142-161.